

Peran Generasi Muda Dalam Menangkal Hoax Di Media Sosial Untuk Membangun Budaya Demokrasi Indonesia

I Made Kartika
Universitas Dwijendra
kartika@undwi.ac.id

I Putu Bagus Mustika
Universitas Dwijendra
bagusmustika6@gmail.com

Abstrak

Di era digital ini, hoax sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik. Selama ini hoax di media sosial telah mengikis kedamaian, persaudaraan, toleransi dan menghargai perbedaan, saling percaya, dan taat pada hukum yang merupakan budaya demokrasi Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran generasi muda dalam menangkal hoax di media sosial untuk membangun budaya demokrasi Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa peran generasi muda dalam menangkal hoax di media sosial untuk membangun budaya demokrasi Indonesia dilakukan dengan (1) membangun budaya bermedia sosial dengan etika yang santun; (2) menjernihkan narasi politik yang mengandung kebohongan di media sosial; (3) menggelorakan semangat nasionalisme dalam berpolitik di media sosial; (4) melaporkan konten atau akun yang menyebarkan berita politik yang hoax; (5) bergabung atau membentuk organisasi/komunitas.

Kata Kunci: Generasi muda; Menangkal hoax; Media sosial; Budaya demokrasi.

I. PENDAHULUAN

Belakangan ini sering kali kita mendengar konten media sosial banyak yang mengandung unsur-unsur negatif seperti pornografi, provokasi yang bernuansakan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) (Amunga, 2021), penyebaran paham-paham radikal, perjudian online sampai pada prostitusi dan ujaran kebencian (*hate speech*) (Sauca, Tusan and Ibrahim, 2023). Tidak kalah menghebohkan masyarakat Indonesia adalah semakin masifnya penyebaran berita bohong (*hoax*) yang dilakukan orang tidak bertanggungjawab melalui media sosial (Santika, 2022). Padahal media sosial hampir tidak

memiliki perbedaan fungsi dengan dunia nyata, yang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam berbagai bidang, seperti sosial, budaya, ekonomi, bisnis, bahkan politik (Arif, 2016).

Secara empiris konten *hoax* di Indonesia sering sekali dijumpai pada media sosial dengan tema politik. Biasanya *hoax* tumbuh subur dan tidak terkendali di media sosial, terutama menjelang perhelatan politik (Park and Rim, 2018). Di era digital ini, berita *hoax* sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan politik (Tchakounté et al., 2022). Disadari atau tidak, banyak orang di media sosial yang mengacu pada berita *hoax* saat

membicarakan politik. Lihat saja konten *hoax* di media sosial mendekati Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada tahun 2017 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 yang cenderung mengalami peningkatan (Hui, 2020). Tentu saja narasi *hoax* yang ditebarkan dan dibangun melalui media sosial bertujuan untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu dengan ujaran kebencian, fitnah, kebohongan, dan caciannya.

Sangatlah disayangkan, bahwa media sosial sebagai panggung politik yang seharusnya digunakan untuk ajang adu visi-misi, program kerja, ide dan gagasan malah disalahgunakan untuk mejelek-jelekan lawan politik. Narasi *hoax* dengan menggandeng politik identitas bernaluansu suku, agama, ras dan agama (SARA) dan disertai dengan ujaran kebencian dan fitnah justru terus-menerus digencarkan untuk memenangkan kontestasi politik. Sekelas lembaga-lembaga pemilu, seperti KPU dan Bawaslu pun tidak luput dari serangan *hoax* di media sosial. Merebaknya konten *hoax* seputar isu politik yang menghiasi dan mewarnai perhelatan politik di Indonesia menunjukkan terjadinya penurunan kualitas politik yang dapat mengarah pada goyahnya demokrasi itu sendiri (Santika, 2021).

Konten politik yang *hoax* di media sosial sangatlah berbahaya bagi kesehatan demokrasi (Tucker et al., 2018). Sebab melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada penyelenggaraan pemilihan umum yang kredibel. Selama ini *hoax* di media sosial telah mengikis kedamaian, persaudaraan, toleran dan menghargai

perbedaan, saling percaya, dan taat pada hukum yang merupakan budaya demokrasi Indonesia (Santika, 2019). Populernya narasi politik yang dipenuhi *hoax* di media sosial tanpa disadari merongrong persatuan dan kesatuan bangsa. Realitas menunjukkan, bahwa berita *hoax* yang disebarluaskan dan dikampanyekan secara terstruktur dan sistematis tidak hanya berbahaya secara individu (Nayoga et al., 2021), tetapi juga berbahaya dalam konteks ke-Indonesia-an. Dalam jangka panjang, gara-gara berita *hoax* integrasi bangsa Indonesia pun menjadi pertaruhan di masa depan.

Sesungguhnya negara sudah banting tulang untuk memberantas masifnya penyebaran konten *hoax* di media sosial. Berbagai lembaga telah dilibatkan negara untuk memerangi berita *hoax*, seperti Kominfo, Kepolisian, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Badan Intelijen Negara (BIN) (Hardi and Hawing, 2022). Berbagai langkah preventif dan represif telah dijalankan pemerintah untuk membendung *hoax* di media sosial. Mulai dari membentuk UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengedukasi masyarakat, menutup atau memblokir akun-akun penyebar berita *hoax* sampai pada penegakan hukum terhadap pembuat dan penyebar konten *hoax*. Namun usaha tersebut tampak belum sepenuhnya dapat memberantas berita *hoax* yang merajalela di media sosial (Park and Rim, 2020).

Berdasarkan analisis awal yang dilakukan, dapat diketahui bahwa kelemahan mendasar dari

strategi yang diterapkan negara dalam pemberantasan konten *hoax* di media sosial adalah minimnya pelibatan peran pemuda. Padahal menurut (Syafii, Fathurohman and Fardani, 2022) bahwa dalam penggunaan media sosial saat ini, kalangan muda sebagai generasi milenial atau digital native merupakan pengguna terbesar. Dari data yang rilis oleh Kemenko Info pada tahun 2014 rata-rata pengguna internet terbanyak adalah kelompok pemuda yang berada di kisaran usia 18 sampai dengan 25 tahun dan 26 tahun sampai dengan 33 tahun (Mujahiddin and Said, 2017). Dengan memperhatikan data tersebut, sudah seharusnya pemuda ikut berperan aktif dalam menangkal penyebaran berita politik yang memuat *hoax* di media sosial, sebab dapat merusak budaya demokrasi Indonesia. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat judul peran pemuda dalam menangkal *hoax* di media sosial untuk membangun budaya demokrasi Indonesia.

II. METODE

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk menangkap fenomena yang muncul di media sosial, yaitu masifnya penyebaran konten *hoax* menjelang kontestasi politik setiap lima tahun. Selain itu, minimnya keterlibatan pemuda untuk ikut membantu pemerintah dalam menangkal berita politik yang mengandung narasi *hoax* di media sosial. Permasalahan tersebutlah yang hendak dipecahkan melalui penelitian ini. Jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kajian literatur. Literatur yang dimaksud bersumber dari internet, majalah, buku, artikel ilmiah, dan media massa. Data-data yang dihimpun peneliti adalah yang berhubungan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Teknis analisis ini dilakukan dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan fakta-fakta yang disusul kemudian dengan analisis, namun tidak semata-mata menguraikan, melainkan bermaksud memberikan pemahaman dan penjelasan lebih komprehensif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN.

Peran generasi pemuda di era digital ini, utamanya dalam menangkal berita politik mengandung narasi *hoax* yang tersebar secara massif di media sosial sebenarnya dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sangat sederhana. Pentingnya peran generasi muda dalam kehidupan politik berbangsa dan bernegara, mengingat keberadaannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari demokrasi itu sendiri yang memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat menentukan dalam sistem politik Indonesia. Sebagai generasi milenial yang tingkat literasi digitalnya tinggi (Takavarasha, Cilliers and Chinyamurindi, 2018) (Radovanović, Hogan and Lalić, 2015), sudah seharusnya mampu menunjukkan perannya untuk membangun budaya demokrasi Indonesia melalui media sosial dengan jalan menangkal meluasnya penyebaran *hoax*.

Dengan jumlah pemuda di Indonesia mencapai 62.061.400 jiwa pada tahun 2016, seharusnya menjadi peluang emas bagi negara untuk melibatkan perannya dalam menangkal *hoax* dan membangun budaya demokrasi melalui media sosial. Secara lebih rinci dapat dilihat bagan yang menjelaskan peran generasi muda dalam menangkal *hoax* di media sosial untuk membangun budaya demokrasi Indonesia di bawah ini.



Peran pertama dan sangat sederhana yang dapat dilakukan generasi muda dalam menangkal *hoax* adalah membangun budaya bermedia sosial dengan etika yang santun dan menjauhkan diri dari saling mengujar kebencian, menghujat, mencibir, mencela dan memfitnah lawan bicara. Generasi muda haruslah memposisikan diri sebagai teladan dalam bermedia sosial yang baik. Bukan malah sebaliknya menjadi salah satu produsen atau konsumen *hoax* politik di negeri ini. Generasi muda harus berperan dalam membudayakan etika berpolitik dalam bermedia sosial (Khalid, Hassan and Shabir, 2020) untuk membangun demokrasi Indonesia. Bahasa politik yang digunakan generasi muda haruslah mampu

menyiratkan, bahwa media sosial bukanlah tempat untuk menyebarkan narasi kebohongan untuk mengacaukan demokrasi (Khatimah, 2022). Untuk sampai pada pembangunan budaya demokrasi Indonesia, hal yang dapat dilakukan generasi muda adalah dengan menunjukkan etika berkomunikasi yang baik di media sosial (Kaplan and Haenlein, 2010).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, generasi muda sudah seharusnya mulai membiasakan diri untuk menggunakan istilah-istilah atau bahasa politik yang baik dan benar, sehingga terhindar atau tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi orang yang membaca atau mendengarnya. Selain menggunakan bahasa politik yang sopan dan santun, pada saat berkomunikasi di media sosial hindarilah penggunaan kata-kata yang melahirkan makna ambigu atau multitasir (Abdalrahman and Abdullah, 2022). Sejauh mungkin jangan sampai menyebarkan imformasi politik yang di dalamnya mencampuradukan dengan unsur suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Terlebih lagi Indonesia adalah negara yang tingkat kemajemukannya begitu kompleks, sehingga politik yang dikawinkan dengan SARA sering kali menimbulkan persepsi yang keliru dan kesalahpahaman yang berujung terjadinya gesekan horizontal yang mengancam integrasi bangsa.

Pemilihan bahasa yang dapat digunakan generasi muda dalam bermedia sosial untuk menangkal *hoax* dan membangun budaya

demokrasi Indonesia bertujuan untuk membangun suasana yang damai dalam perpolitikan Indonesia yang cenderung suhunya semakin panas dan terus meningkat menjelang perhelatan politik. Bahasa politik yang digunakan generasi muda dalam media sosial untuk menangkal *hoax* politik haruslah mampu merajut persaudaraan dalam perbedaan politik yang ada. Budaya demokrasi yang dibangun generasi muda di media sosial untuk menangkal *hoax* adalah dengan mempropagandakan sikap toleransi, menghargai dan menjunjung tinggi perbedaan politik, membangun rasa saling percaya terutama terhadap lembaga-lembaga politik yang diberikan amanat oleh UUD 1945 maupun UU untuk menyelenggarakan pemilu, dan senantiasa taat pada hukum yang berlaku (Santika, 2022b).

Peran kedua yang dapat dilakukan pemuda dalam menangkal *hoax* untuk membangun budaya demokrasi Indonesia adalah dengan membantu pemerintah untuk menjernihkan narasi politik yang mengandung kebohongan di media sosial. Pemuda Indonesia sebagai kaum milenial haruslah aktif dan mampu menunjukkan peran konstruktifnya di media sosial (Hamid et al., 2022). Keaktifan tersebut tidak sekedar berpetualang di media sosial saja, tetapi juga ikut berperan untuk menangkal berita bohong terkait politik. Tentu saja rasionalitas atas perannya itu karena pemuda Indonesia memiliki gaya pemikiran kritis atau nalar yang logis dalam menerima dan menyerap imformasi di media sosial (Wahyuni etc, 2022). Dengan berbekal

keterampilan yang diperolehnya di bangku pendidikan, tentunya tidak butuh waktu yang lama bagi generasi muda untuk mengenali, mengidentifikasi dan mengkomparasikan serta memutuskan keakuratan imformasi politik yang ada di media sosial (Flanigin and Metzger, 2010).

Dengan bermodalkan kecerdasan intelektual dan pemikiran terbukanya, generasi muda Indonesia diharapkan menjadi promotor terdepan untuk menyuguhkan imformasi politik yang akurat dan valid di media sosial. Untuk itu, generasi muda Indonesia harus senantiasa aktif di media sosial untuk membuat *story* atau status yang maksud dan tujuannya mengedukasi masyarakat atau mengkonter berita politik yang mengandung narasi *hoax*. Di era revolusi industri 5.0 yang menandakan digitalisasi (Santika, 2021b), generasi muda sudah harus mengubah *mindset* atau orientasi berpikirnya, dari yang sebelumnya di media sosial hanya mengumbar eksistensinya saja, tetapi kemudian mulai memfokuskan dirinya sebagai sarana penyadaran kolektif untuk menangkal atau melawan berita *hoax*. Hal yang dapat dilakukan generasi muda adalah dengan menulis status atau *story* singkat tentang bahayanya berita politik yang narasinya *hoax* (Platt, 2008), politik damai tanpa *hoax*, *hoax* merusak demokrasi, jaga demokrasi dari *hoax*, lawan *hoax* di media sosial dan lain sebagainya.

Peran ketiga yang dapat dilakukan generasi muda untuk menangkal *hoax* dan membangun budaya demokrasi Indonesia adalah dengan menggelorakan dan mengkampanyekan semangat

nasionalisme dalam berpolitik di media sosial (Chan, 2014). Ditenggarai begitu banyaknya narasi hoax politik yang bertebaran di media sosial adalah rendahnya sikap nasionalisme warga negara terhadap negaranya. Dengan semangat nasionalisme yang begitu rendah, kepentingan politik pragmatis lebih mudah menyusupi pemikiran warga negara. Sehingga tidak segan untuk menyebarkan *hoax* meskipun mengorbankan kepentingan bangsa dan negara demi mencapai tujuan pribadinya. Apalagi yang menjadi sasaran empuk kepentingan politik dan target berita *hoax* di media sosial adalah generasi muda. Karena dihitung dari percaturan politik di tanah air, suara generasi milenial cukup menentukan kemenangan dalam kontestasi politik. Tidak heran suara generasi muda menjelang pemilu selalu menjadi rebutan. Untuk mendapatkan dukungan dari generasi muda, kontestan politik tidak ragu lagi dalam mengerahkan pasukan cybernya di media sosial untuk mempengaruhinya, sekalipun dengan narasi *hoax*.

Kepentingan politik pragmatis seperti itulah haruslah dihadapi dan dilawan generasi muda dengan cara mengkampayekan semangat nasionalisme di media sosial. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak mudah terjebak pada politik pragmatis yang disebarluaskan di media sosial dengan memanipulasi kebenaran. Disinilah peran generasi muda di media sosial untuk selalu konsisten menyuarakan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di atas

kepentingan politik. Rasa persaudaraan yang sejatinya sudah tertanam sejak dahulu perlu disuarakan dan digaungkan kembali oleh generasi muda melalui media sosialnya masing-masing. Dengan strategi seperti itu, sebenarnya generasi muda melalui perannya di media sosial telah mampu menyiapkan warga negara Indonesia yang cerdas dalam berpolitik dan berdemokrasi tanpa harus mengorbankan kepentingan bangsa dan negaranya. *Hoax* politik pun yang di dalamnya mengandung unsur disintegrasi bangsa tidak akan dapat mempengaruhi pengguna media sosial, sebab sikap dan semangat nasionalisme lebih berorientasi pada prinsip persatuan bangsa (Santika & Konda, 2023).

Peran ke empat yang dapat dilakukan generasi muda untuk membangun budaya demokrasi Indonesia dengan menangkal *hoax* politik di media sosial adalah dengan berpartisipasi aktif melaporkan konten-konten atau pun akun-akun, website, blog yang menyebarkan berita politik tetapi muatannya tidak benar. Realitas di lapangan sangat jelas menunjukkan begitu banyak berita politik atau akun-akun di media sosial yang memang dibuat secara sengaja untuk menggandakan dan menyebarkan beragam konten tidak benar dengan jalan menyembunyikan atau memanipulasi fakta-fakta yang ada. Negara melalui beberapa institusinya, seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan

Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebenarnya telah bekerja keras dan terus berupaya untuk menanggulangi berita-berita politik *hoax* di media sosial dengan cara menghapusnya ataupun men *take down* (menutup) akun-akun bodong, *website*, blog, dan media yang diduga menyebarkan konten-konten politik palsu.

Hanya saja jika dicermati secara saksama dari pesatnya perkembangan media sosial dan penggunanya di Indonesia, maka haruslah dipahami, bahwa lembaga yang dibentuk negara untuk menanggulangi penyebaran *hoax* politik di Indonesia tentunya memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan yang paling mendasar dan fundamental dari lembaga negara tersebut adalah dapat dipahami jika memperhatikan kondisi sumber daya manusianya (SDM) (Kapoh etc, 2023). Keterbatasan tersebut menyiratkan, bahwa mustahil bagi lembaga negara untuk menangani semua berita *hoax* politik yang beredar di media sosial dengan cepat. Keterlambatan dalam penanganan berita *hoax* politik di media sosial pada gilirannya dapat menimbulkan permasalahan dan konsekuensi yang berbahaya bagi integrasi bangsa. Atas dasar itu, dipandang perlu mengoptimalkan peran generasi muda untuk ikut membantu institusi negara melaporkan konten politik bermuatan *hoax*, sehingga penanganannya dapat dilakukan sesegera mungkin.

Sebagai generasi milenial yang kesehariannya sangat akrab dengan media sosial (Sujana etc, 2023), sudah saatnya bersama-sama

negara bergandengan tangan dan berkolaborasi untuk menangkal *hoax* dan menyelamatkan demokrasi Indonesia dengan mengadukan konten atau situs-situs penyebar *hoax* politik yang bertujuan memperkeruh kontestasi damai di Indonesia. Namun untuk dapat memainkan perannya secara maksimal, perlulah generasi muda mengetahui dan memahami mekanisme atau saluran-saluran aduan yang dapat memudahkannya dalam melaporkan konten *hoax* politik yang bertebaran dan meraja rela di media sosial (Buka etc, 2022). Untuk mengoptimalkan peran generasi muda, Pemerintah sendiri sebenarnya telah menyiapkan berbagai saluran yang dapat dimanfaatkannya untuk melaporkan aktifitas politik di media sosial yang dicurigai dan tendensinya mengandung ketidakbenaran. Untuk itu, generasi muda dapat mengadukan berbagai konten *hoax* politik di media sosial melalui berbagai laman yang disediakan, seperti aduankonten.id, aduankonten@kominfo.go.id, dan melalui akun Twitter @aduankonten. Aduan terhadap konten bohong di media sosial dapat juga dilakukan melalui WhatsApp di nomor 08119224545.

Peran kelima yang dapat dilakukan generasi muda untuk membangun budaya demokrasi Indonesia dengan menangkal politik *hoax* di media sosial adalah ikut serta bergabung atau membentuk organisasi/komunitas mandiri yang pembentukannya oleh masyarakat memang secara sengaja untuk mendukung dan memmbantu pemerintah atau aparat berwenang

dalam memberantas konten-konten politik yang mengandung kebohongan. Sesungguhnya terdapat beberapa komunitas yang sudah dibentuk oleh generasi muda atau masyarakat yang peduli terhadap masifnya penyebaran berita *hoax* politik di Indonesia. Organisasi yang dibentuk memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk menangkal penyebaran berita *hoax*, termasuk konten *hoax* politik di media sosial. Beberapa komunitas anti *hoax* yang terbentuk seperti (Komunitas Online Anti Hoax di Indonesia) seperti Turn Back Hoax, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) (Syarifah et al., 2022), Hansip Hoax dan lain sebagainya.

Kehadiran dan keberadaan komunitas ini memiliki arti yang sangat penting dalam menangkal, menanggulangi serta memberantas berbagai *hoax* yang tersebar di media sosial. Dalam berbagai kesempatannya, Pemerintah sendiri telah mengakui bagaimana fungsionalnya peran komunitas atau organisasi penggiat anti *hoax* tersebut. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya bagi generasi muda untuk ikut terlibat dan bergabung dalam organisasi semacam itu. Dengan menjadi satu wadah atau organisasi, tentunya generasi muda dapat lebih mudah dalam menganalisis, mengidentifikasi, dan juga menangkal berita politik yang di dalamnya mengandung kepalsuan atau kebohongan. Selain bergabung dengan organisasi anti *hoax*, generasi muda berdasarkan visi dan misi yang sama dapat membentuk semacam peguyuban kecil. Hal ini didasari dengan pemikiran, bahwa berkumpul

bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki fokus dan perhatian sama (menangkal berita politik yang memuat *hoax* di media sosial), akan membuatnya menjadi semakin kuat.

Mengingat dalam media sosial, telah disediakan fitur tertentu yang dapat digunakan untuk melaporkan sebuah situs, website, akun, dan blog yang menyebarkan berbagai berita *hoax*. Hal itu dilakukan penyedia layanan untuk mengawasi penggunanya agar tidak menyimpang dari ketentuan yang ada. Bahkan jika semakin banyak yang melaporkan atau mengadukan sebuah berita di media sosial, kemungkinan besar sebuah akun akan diblokir atau ditutup oleh penyedia layanan. Disinilah terlihat mengapa generasi muda perlu bergabung dalam sebuah organisasi. Karena dengan anggota yang banyak, maka akan semakin mudah untuk membumi hanguskan akun-akun penyebar fitnah di media sosial. Dalam hitungan menit saja akun media sosial akan ditutup jika mendapatkan laporan yang banyak.

Dasar pemikiran bagi generasi muda untuk bergerak dalam sebuah wadah atau komunitas adalah untuk memudahkannya dalam mengidentifikasi dan mengetahui sebuah berita adalah palsu atau *hoax*. Karenanya perlulah generasi muda untuk lebih banyak bergaul dengan orang-orang yang memiliki pengalaman luas tentang hal tersebut. Oleh sebab itulah generasi muda harus mulai berperan mencari imformasi akurat dan valid dari berbagai sumber yang ada, termasuk dengan bergabung dalam komunitas

anti *hoax*. Peran ini sebenarnya sangat penting bagi generasi muda, sebab dengan bergabung dalam suatu komunitas anti *hoax*, maka dengan sendirinya telah membentengi diri dari berbagai konten *hoax* yang dapat menyesatkan. Dengan bergaul di sebuah komunitas yang perhatiannya konsen terhadap berita-berita politik yang substansinya mengandung *hoax*, maka pengetahuannya generasi muda akan lebih mendalam. Berbekal ilmu yang diperoleh dari komunitas itulah yang harus dilakukan untuk menangkal berita *hoax* di media sosial.

IV. SIMPULAN.

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa peran generasi muda dalam menangkal *hoax* untuk membangun budaya demokrasi Indonesia dilakukan melalui beberapa peran, yaitu peran pertama yang dapat dilakukan generasi muda adalah membangun budaya bermedia sosial dengan etika yang santun dan jauh dari ujaran kebencian, hujatan, cibiran, celaan dan fitnah. Generasi muda haruslah memposisikan diri sebagai teladan dalam bermedia sosial yang baik. Bukan malah sebaliknya menjadi salah satu produsen atau konsumen *hoax* politik di negeri ini; Peran kedua yang dapat dilakukan pemuda dalam menangkal *hoax* untuk membangun budaya demokrasi Indonesia adalah dengan membantu pemerintah untuk menjernihkan narasi politik yang mengandung kebohongan di media sosial. Pemuda Indonesia sebagai kaum milenial

haruslah aktif dan mampu menunjukkan peran konstruktifnya di media sosial; Peran ketiga yang dapat dilakukan generasi muda untuk menangkal *hoax* adalah dengan menggelorakan semangat nasionalisme dalam berpolitik di media sosial. Dengan semangat nasionalisme yang begitu rendah, kepentingan politik pragmatis lebih mudah menyusupi pemikiran warga negara; Peran keempat yang dapat dilakukan generasi muda untuk membangun budaya demokrasi melalui menangkal *hoax* di media sosial adalah melaporkan konten-konten atau pun akun-akun yang menyebarkan berita politik yang tidak benar; Peran kelima yang dapat dilakukan generasi muda untuk membangun budaya demokrasi dengan menangkal *hoax* di media sosial adalah dengan bergabung atau membentuk organisasi/komunitas yang memang sengaja dibentuk untuk membantu pemerintah dalam memberantas konten bohong.

DAFTAR PUSTAKA.

- Abdalrahman, K. K. and Abdullah, C. A. (2022). The Misuse of Emojis in Sosial Media: The Case of Kurdish Facebook Users. *International Journal of Sosial Sciences & Educational Studies*, 9(3), 118–137. doi: 10.23918/ijsses.v9i3p118.
- Amunga, J. (2021). A new decade for sosial changes. *Technium Sosial Sciences Journal*, 2 (1). 459. Available at: www.techniumscience.com.
- Ansari, M. S., Channar, Z. A. and Syed, A. (2012). Mobile phone adoption and appropriation among the young generation. *Procedia - Sosial and Behavioral Sciences*. 4 (1). 265–272. doi: 10.1016/j.sbspro.2012.04.030.
- Arif, R. (2016). Internet as a Hope or a Hoax for Emerging Democracies: Revisiting the Concept of Citizenship in the Digital Age.

- Procedia - Sosial and Behavioral Sciences*, 236(December 2015). 4–8. doi: 10.1016/j.sbspro.2016.12.002.
- Bailey, A. and Ngwenyama, O. (2020). Bridging the generation gap in ICT use: Interrogating identity, technology and interactions in community telecenters. *Information Technology for Development*, 16(1), 62–82. doi: 10.1080/02681100903566156.
- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109–117.
- Chan, Y. (2014). Political Engagement and Political Efficacy Through Sosial ‘Friendships’ on Facebook – Impact of Presidential Campaigns Through Sosial Networking Sites in Taiwan.
- Delanty, G. (2011). Cultural diversity, democracy and the prospects of cosmopolitanism: A theory of cultural encounters. *British Journal of Sociology*. 62 (4), 633–656. doi: 10.1111/j.1468-4446.2011.01384.x.
- Flanagan, A. J. and Metzger, M. J. (2010). Kids and credibility: An empirical examination of youth, digital media use, and information credibility.
- Glover, T. D., Shinew, K. J. and Parry, D. C. (2005). Association, sociability, and civic culture: The democratic effect of community gardening. *Leisure Sciences*, 27(1), 75–92. doi: 10.1080/01490400590886060.
- Hamid, R. S. et al. (2022). The role of sosial media in the political involvement of millennials. *Spanish Journal of Marketing - ESIC*, 26(1), 61–79. doi: 10.1108/SJME-08-2021-0151.
- Handitya, B. (2019). Menyemai Nilai Pancasila Pada Generasi Muda Cendekia. *Adil Jurnal*, 2(1), pp. 13–23.
- Hardi, R. and Hawing, H. (2022). Collaborative Governance and Hoax Politics in The Era of Covid-19 in Makassar City. *Journal of Government and Political Issues*, 2(1), 1–7. doi: 10.53341/jgpi.v2i1.24.
- Hui, J. Y. (2020). Sosial Media and the 2019 Indonesian Elections: Hoax Takes the Centre Stage. *Southeast Asian Affairs*, SEAA, 20(1), 155–174. doi: 10.1355/aa20-1i.
- Kapoh, R. J., Pattiasina, P. J., Rutumalessy, M., Wariunsora, M., Tabelessy, N., & Santika, I. G. N. (2023). Analyzing the Teacher's Central Role in Effort to Realize Quality Character Education. *Journal of Education Research*, 4(2), 452–459.
- Iivari, N., Sharma, S. and Ventä-Olkkinen, L. (2020). Digital transformation of everyday life – How COVID-19 pandemic transformed the basic education of the young generation and why information management research should care?. *International Journal of Information Management*, 55 (1), 102183. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2020.102183.
- Kamisuna, T. (2023). International origin and development of nationalism: Generational transformation of East Timorese nationalism under Indonesia's occupation (1975–1999). *Nations and Nationalism*, 1–17. doi: 10.1111/nana.12952.
- Kaplan, A. M. and Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Sosial Media. *Business Horizons*, 53(1), 59–68. doi: 10.1016/j.bushor.2009.09.003.
- Khalid, A., Hassan, T. U. and Shabir, G. (2020). Cultivation Effects of Sosial Media on Cognitive, Sosial and Moral Skills of Adolescents in Pakistan. *Journal of Business and Sosial Review in Emerging Economies*, 6(2), 419–436. doi: 10.26710/jbsee.v6i2.1146.
- Khatimah, H., Kartika, I. M., & Santika, I. G. N. (2022). Pengaruh Implementasi Pendidikan Karakter Terhadap Sikap Sosial Pada Siswa. *Widya Accarya*, 13(2), 127–132.
- Lilawati, A. (2020). Peran Orang Tua dalam Mendukung Kegiatan Pembelajaran di Rumah pada Masa Pandemi. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 549. doi: 10.31004/obsesi.v5i1.630.
- Muhid, A. et al. (2019). The Effect of Hate Speech Exposure on Religious Intolerance Among Indonesian Muslim Teenagers. *in*, 148–153. doi: 10.2991/adics-elssh-19.2019.31.
- Mujahiddin, M. and Said, H. (2017). Model Penggunaan Media Sosial di Kalangan Pemuda. *Jurnal Interaksi*, 1(2), 142–155. Available at: <http://teknoliputan6.com/>.
- Nayoga, B. P. et al. (2021). Hoax Analyzer for Indonesian News Using Deep Learning Models. *Procedia Computer Science*, 704–712. doi: 10.1016/j.procs.2021.01.059.

- Park, K. and Rim, H. (2018). Hoaxes, Sosial Media Ideology, Political and The Role of Issue Confidence. *Telematics and Informatics*, 104-114.
- Park, K. and Rim, H. (2020). Click First!": The Effects of Instant Activism Via a Hoax on Sosial Media. *Sosial Media and Society*, 6(2). doi: 10.1177/2056305120904706.
- Paul, S. A. S. et al. (2022). Parents' perspectives on home-based character education activities. *Journal of Family Studies*, 28(3), 1158–1180. doi: 10.1080/13229400.2020.1806097.
- Platt, A. (2008). American Behavioral Scientist: Introduction. *American Behavioral Scientist*, 51(9), pp. 1283–1284. doi: 10.1177/0002764208316324.
- Purnomo, M. H. et al. (2017). Keynote Speaker II: Biomedical Engineering Research in the Sosial Network Analysis Era: Stance Classification for Analysis of Hoax Medical News in Sosial Media. *Procedia Computer Science*, 116, pp. 3–9. doi: 10.1016/j.procs.2017.10.049.
- Radovanović, D., Hogan, B. and Lalić, D. (2015). Overcoming digital divides in higher education: Digital literacy beyond Facebook. *New Media and Society*, 17(10), pp. 1733–1749. doi: 10.1177/1461444815588323.
- Santika, I. G. N. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945)*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2021b). Grand desain kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan untuk menghadapi revolusi industri 4.0. *Jurnal Education and development*, 9(2), 369-377.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*.
- Santika, I. G. N., Sujana, I. G., Kartika, I. M., & Suastika, I. N. (2022b). Alur Pemikiran Finalisasi Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 7(3), 552-561.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N., & Konda, A. A. (2023, March). THE THEORY OF PANCAKILA ELEMENTS AS A REORIENTATION OF CHARACTER EDUCATION IN INDONESIA IN BUILDING THE SPIRIT OF NATIONALISM. In *Proceedings of The International Conference on Multi-Disciplines Approaches for The Sustainable Development* (pp. 79-85).
- Sari, D. (2017). Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Belajar Siswa. in *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*, 1–43.
- Sauca, I. P., Tusan, A. and Ibrahim, R. (2023). Fake News and Hate Speech on sosial media : How Does a State take care in its response ?. *Journal of Survey in Fisheries Sciences*, 10(1), pp. 263–279.
- Sleeter, C. (2008). Equity, democracy, and neoliberal assaults on teacher education. *Teaching and Teacher Education*, 24(8), 1947–1957. doi: 10.1016/j.tate.2008.04.003.
- Sujana, I. G., Semadi, A. A. G. P., Suarningsih, N. M., Retnaningrum, E., Widyatiningtyas, R., & Santika, I. G. N. (2023). The Strategic Role of Parents in Optimizing Character Education in Early Childhood in the Family Environment. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(3), 3241-3252.
- Syafii, M. S., Fathurohman, I. and Fardani, M. A. (2022). Metode Pelatihan Teater untuk Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Anak Usia Sekolah Dasar. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pendidikan*, 6(1), pp. 88–96. doi: 10.23887/jppp.v6i1.44954.
- Syarifah, E. R. et al. (2022). The Disinfodemic Mitigation Strategy of Mafindo in Indonesia. *International Journal of Sosial Science*, 1(6), 879–888. doi: 10.53625/ijss.v1i6.1903.
- Takavarasha, S., Cilliers, L. and Chinyamurindi, W. (2018). Navigating the unbeaten track from digital literacy to digital citizenship: A case of university students in South Africa's Eastern Cape province. *Reading & Writing*, 9(1), 1–15. doi: 10.4102/rw.v9i1.187.
- Tchakounté, F. et al. (2022). A smart contract logic to reduce hoax propagation across sosial media. *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, 34(6), 3070–3078. doi: 10.1016/j.jksuci.2020.09.001.

Tucker, J. A. et al. (2018). Sosial media, political polarization, and political disinformation, Hewlett Foundation. Available at: <http://www.infoanimales.com/tortugas-terrestre>.

Wahid, U. and Syahputra, I. (2020). Hoax Logic in the Political Activities of Indonesian Netizens on Twitter', International Journal of Innovation. 14(2), 1415–1432. Available at: https://www.ijicc.net/images/Vol_14/Iss_2/14291_Wahid_2020_E_R.pdf

Wahyuni, N. P. S., Widiastuti, N. L. G. K., & Santika, I. G. N. (2022). Implementasi Metode Examples Non Examples Dalam Pembelajaran Daring Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Citra Bakti*, 9(1), 50-61.